



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI INFORMASI PUSAT

UNIT KERJA : KOMISIONER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAWALUDIN

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : **879559**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.150.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
- Tanah Seluas 409 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG,
 HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah Seluas 645 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG,
 HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 90.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SPALSH Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA	KPA	KPILL	Rp.	VP VP
SURAT BERHARGA			Rp.	
KAS DAN SETARA KAS	JOK.	JOK-	Rp.	50.000.000
HARTA LAINNYA			Rp.	W.
Sub Total	al.	al.	Rp.	1.290.000.000
TANG	Kon	KPI	Rp.	Ker Ker
TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)			Rp.	1.290.000.000
	SURAT BERHARGA KAS DAN SETARA KAS HARTA LAINNYA	SURAT BERHARGA KAS DAN SETARA KAS HARTA LAINNYA Sub Total TANG	SURAT BERHARGA KAS DAN SETARA KAS HARTA LAINNYA Sub Total TANG	SURAT BERHARGA Rp. KAS DAN SETARA KAS Rp. HARTA LAINNYA Rp. Sub Total Rp. TANG Rp.

al al

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara







Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

